

## Moeldoko Diusir dan Ditolak Peserta Aksi Kamisan di Semarang

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko diusir peserta Aksi Kamisan yang menggelar unjuk rasa di Taman Signature, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11).

Peserta aksi menandatangani tuntutan agar festival HAM tidak dihadiri oleh para pelanggar HAM. Moeldoko yang baru saja selesai menjadi pembicara kunci dalam rangkaian Festival HAM itu, langsung menemui mereka. Saat tiba di hadapan massa, Moeldoko langsung ditolak oleh peserta Aksi Kamisan.

"Para pelanggar HAM tidak boleh bicara HAM!" seru mereka.

Mereka juga menyuruh Moeldoko meninggalkan arena. Moeldoko yang disambut penolakan massa itu mengatakan pemerintah tidak antikritik.

"Ini merupakan penghormatan kepada HAM, memastikan hak berbicara terpenuhi. Kita hormati dan kita dengar aspirasinya. Pemerintah tidak anti kritik," ujarnya.

Mantan Panglima TNI

itu mengklaim pemerintah serius menyelesaikan berbagai persoalan dan kasus HAM yang ada.

"Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah HAM karena ini merupakan salah satu janji Presiden yang harus dituntaskan," ujarnya.

Kepada pengunjung rasa, Moeldoko mengakui jika tidak mudah menyelesaikan persoalan yang ada.

Aksi Kamisan Semarang digelar para aktivis saat Festival HAM 2021 berlangsung. Aksi tersebut mengkritisi penyelenggaraan Festival HAM 2021 yang dianggap memberikan panggung bagi para pelanggar HAM. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara juga turut menemui peserta aksi.

"Pak Moeldoko ada di sini jadi bukti pemerintah mendukung Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM. Kami terus mendorong dan mengajak berbagai elemen untuk berkolaborasi bersama mencari solusi terbaik bagi bangsa," kata Beka. ● han

## Kostrad Pamer Tank Leopard hingga Helikopter Apache di Martapura

JAKARTA (IM) - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Bakti Agus Fadjar menghadiri puncak Latihan Antar Kecelakaan (Latancab) TNI AD Kartika Yudha 2021, yang dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklatad, Martapura, OKU, Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut berakhir pada Kamis (18/11).

Fadjar menjelaskan, latihan ini bertujuan untuk membina, memelihara kesiapan operasi dan meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AD. Tak hanya itu, latihan ini juga meningkatkan kerja sama satuan kecabangan TNI AD untuk mendukung tugas pokok TNI AD menjaga kedaulatan NKRI.

"Banyak sekali kita belajar dari latihan yang saat ini kita laksanakan. Saya berharap semua latihan yang dilaksanakan ini akan semakin meningkatkan kualitas dan kemampuan baik Prajurit maupun satuan," ujar Fadjar dalam keterangannya.

Fadjar mengaku bangga atas keberhasilan dadi pelaksanaan latihan tersebut. Dirinya juga merasa kagum melihat semangat yang tunjukkan oleh para prajurit.

"Terima kasih kepada Dankodiklatad, Pangkostrad yang diwakili Kasakostrad dan seluruh jajaran penyelenggara latihan yang ikut serta terlibat dalam persiapan latihan dan hadir di Puslatpur," katanya.

Menurut dia, dimana pun TNI berada, masyarakat merupakan bagian TNI, begitu pula sebaliknya. Latihan yang dilaksanakan sejak 2 November 2021 melibatkan sebanyak 2.492 pelaku dan penyelenggara dari 15 kecabangan Matra Darat.

Beragam Alutsista terbaru dan berbagai manuver dilakukan. Seperti, penembakan Senjata Mesin Berat (SMB), penembakan Tank Leopard, manuver kendaraan tempur, kerja sama pasukan Infanteri, tembakan heli Apache dengan roket Hellfire dan Hydra serta penembakan SS-40 Astros. ● han

# 2 Polhukam

FOTO/SETKAB.GO.ID



## Tjahjo Minta Risma Siapkan Data Lengkap Soal 31.624 ASN yang Terima Bansos

Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan, ASN dapat diberikan sanksi apabila menyalahgunakan wewenang untuk mendapat keuntungan pribadi terkait bansos.

JAKARTA (IM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyiapkan data lengkap 31.624 aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Menurut Tjahjo, ASN dapat diberikan sanksi apabila menyalahgunakan wewenang untuk mendapat keuntungan pribadi. "Menteri sosial harus memiliki data lengkap nama, NIP dan instansi/lokasi, un-

tuk kemudian dilaporkan kepada PPK (pejabat pembina kepegawaian) masing-masing agar melakukan investigasi terhadap yang bersangkutan," kata Tjahjo, kepada wartawan, Kamis (18/11).

Tjahjo menuturkan, sanksi berupa hukuman disiplin dapat diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Jika memang terbukti, barulah dapat diberikan sanksi disiplin, termasuk pengembalian uang bansos," katanya. Terkait data tersebut,

Tjahjo mengatakan, perlu diperiksa lebih dalam apakah pegawai tersebut dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan atau tidak. Selain itu, dia menambahkan, perlu ditinjau lebih dahulu mengenai mekanisme atau proses penetapan data penerima bansos, sehingga dapat dilakukan validasi dan verifikasi penerima bansos yang memang berhak.

Tjahjo kemudian mengutip isi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non-Tunai yang menyebutkan, penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disebutkan, penyeleng-

garaan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan memiliki kriteria masalah sosial.

Masalah sosial itu antara lain, kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Tjahjo mengatakan, walau tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur soal larangan ASN menerima bansos, namun ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki

### PELANTIKAN ANGGOTA MPR PAW

Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) didampingi Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kanan) melantik Anggota MPR Pengganti Antar Waktu (PAW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11). Ketua MPR melantik lima orang Anggota MPR dalam PAW tersebut yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, PAN dan PKS.

## LaNyalla Singgung RUU Daerah Kepulauan hingga Calon Perseorangan di Muna Barat

MUNA BARAT (IM) - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bersama rombongan senator kemali melanjutkan kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara. LaNyalla mendatangi Kabupaten Muna Barat dan Muna, Kamis (18/11).

Dalam kesempatan itu, Senator asal Jawa Timur itu juga sempat meninjau pelaksanaan vaksinasi di bandara.

"Saya juga apresiasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan bersama BIN. Bahkan 30 persen vaksinasi dan juga menyoroti anak-anak dan pelajar," katanya.

Aspirasi mengenai RUU Daerah Kepulauan juga dibahas. Ketua DPD RI mengatakan akan tetap berusaha mendorong hal itu.

"RUU Daerah Kepulauan sudah masuk Prolegnas. DPD RI juga sudah berkoordinasi dengan 8 Gubernur yang tergabung dalam Badan Kerjasama Daerah Kepulauan. Kita terus mengejar hal itu, dan selalu dipantau oleh Komite I DPD RI," ungkapnya.

Dia juga menyinggung mengenai 7 titik Raja dan Sultan Nusantara. Ia akan memperjuangkan agar kerajaan dan kesultanan agar mendapat perhatian dari negara.

penghasilan tetap gaji dan tunjangan dari negara.

"Oleh karena itu, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial," katanya.

Sebelumnya, Risma mengungkapkan 31.624 ASN terindikasi menerima bansos. Rinciannya, sebanyak 28.965 ASN aktif, sedangkan sisanya pensiunan.

"Yang aktif itu setelah kita cek di data BKN, mungkin sisanya sudah pensiun, itu 28.965 ASN aktif," ucap Risma dalam konferensi pers, Kamis (18/11). ● han

## Harap Draf RUU TPKS Disepakati di Baleg, Ketua Panja: Kalau Tidak, Ya Gugur

JAKARTA (IM) - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya optimis draf RUU itu akan disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 25 November 2021.

Ia berharap, dalam rapat tersebut diambil keputusan final yang mana draf itu mendapat persetujuan fraksi-fraksi.

"Tentu pleno harus diambil keputusan di Baleg, semoga saja bisa lolos. Ini memang spekulasi juga, kalau tidak lolos di Baleg, gugurlah UU itu," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/11).

Meski optimis, Willy tak menampik bahwa penyusunan draf RUU ini masih diwarnai dinamika antar-fraksi. Ia mengaku bahwa dinamika tersebut wajar saja dalam hal politik.

"Pembahasannya tidak deadlock, cuma ya biasalah politik. Kan kalau tidak dinamis, bukan politik namanya," ucapnya.

Kendati demikian, Willy ingin masyarakat tahu bahwa DPR bukan satu kesatuan, melainkan terdiri dari berbagai

anggota partai politik yang kemudian disebut fraksi di dalamnya. Sehingga, menurut dia, tetap akan ada dinamika politik yang terjadi dalam setiap penyusunan RUU.

"DPR ini kumpulan pertarungan parpol, siapa yang sekuat, siapa yang menolak. Itu teman-teman harus tahu," ujarnya.

Lebih lanjut, Willy mengagendakan 25 November sebagai waktu bagi Baleg untuk menyetujui draf RUU TPKS. Setelah itu, Baleg akan membawa draf yang sudah disepakati ke Rapat Paripurna DPR. Adapun harapan Baleg, dalam rapat paripurna itu disahkan bahwa RUU TPKS menjadi hak inisiatif DPR.

"Lalu dikirim ke presiden untuk diterbitkan supres (Surat Presiden) dan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)-nya. Jadi, kita berharap proses panjang ini bisa terjwab dengan cepat," kata Willy.

Sebelumnya, Willy Aditya mengaku, proses menuju pengesahan draf RUU TPKS sebagai hak inisiatif DPR mengalami sedikit hambatan. Pengakuan itu disampaikan setelah panja mengadakan rapat penyusunan draf RUU

TPKS pada Rabu (17/11).

Menurutnya, hal ini dikarenakan belum adanya kata sepakat dari semua fraksi di Panja terkait draf RUU TPKS yang disusun oleh Tim Ahli Baleg. Padahal, Willy sebelumnya berharap, hari ini Panja mampu mengambil keputusan terkait bakal beleid itu.

"Harapan saya, selaku Ketua Panja, diambil sebuah keputusan. Tapi, masih cukup berat," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu usai rapat.

Diketahui, rapat tersebut diwarnai dengan sejumlah dinamika yang belum memutuskan kata sepakat di antara semua fraksi. Menurut Willy, ada sejumlah poin yang menjadi dinamika rapat pada hari ini. Ada ketidaksepakatan di beberapa fraksi dalam Panja terkait judul RUU TPKS.

"Ada beberapa fraksi memang yang minta perubahan judul. Yang pertama, PPP minta jadi tindak pidana seksual. Lalu, PKS minta tindak pidana kesustilaan. Ada juga yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ucap Willy. ●



### SIDANG TIPIKOR YOORY CORNELES

Terdakwa kasus dugaan pengadaan tanah di Munjul Yoory Corneles Pinontoan (kedua kiri) mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/11). Sidang lanjutan tersebut menghadirkan enam saksi dari jaksa penuntut umum KPK.

## Kuasa Hukum Sebut Farid Okbah dkk Belum Mendapatkan Akses Pendampingan

JAKARTA (IM) - Advokat Ismar Syafruddin menilai, penangkapan ketiga kliennya oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri merupakan kriminalisasi. Ismar merupakan kuasa hukum dari tiga tersangka teroris yakni, Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al Hamad.

Menurut Ismar, ketiga kliennya belum mendapatkan akses pendampingan hukum setelah ditangkap Densus 88, pada Selasa (16/11). Selain itu, pihak keluarga juga tidak mengetahui kondisi mereka.

"Sangat jelas ini kriminalisasi buat kami, fakta kalau menurut kami," kata Ismar di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/11).

Ismar menuturkan, keluarga sangat khawatir dengan keselamatan Farid Okbah dkk. Selain itu, penetapan status tersangka terhadap Farid Okbah dkk juga membingungkan.

"Ada apa kok sampai sekarang ini belum ada kepastian. Di mana mereka? Apalagi beliau sekarang sudah ditinggalkan kalau tidak salah. Kok bisa jadi tersangka, kan kami belum dampingi. Padahal hak tersangka itu wajib. Ini yang menjadi

keprihatinan kami," tuturnya.

Ismar pun berharap Densus 88 profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Diberitakan, Densus 88 menangkap Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al Hamad di Pondok Melati, Bekasi, Selasa (16/11).

Zain An-Najah merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (BM ABA) dan Farid Okbah adalah anggota Dewan Syariah LAZ BM ABA. Sementara itu, Anung Al Hamad adalah pendiri "Perisai", suatu badan yang memberikan bantuan hukum bagi anggota JI (Jamaah Islamiyah) yang tertangkap Densus 88 Polri.

Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Polri Kombes (Pol) Aswin Siregar menyatakan, tidak ada upaya kriminalisasi terhadap kelompok atau individu tertentu dalam kegiatan penangkapan teroris.

Aswin menuturkan, tugas Densus 88 yakni memprioritaskan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menegaskan, tiap penangkapan teroris dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup. ● han



### SAFARI KETUA UMUM PBNU KE PESANTREN

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj (tengah) berbincang dengan pengasuh pondok pesantren Lirboyo KH Abdullah Kafabih Mahrus (kanan) sebelum mengisi orasi ilmiah di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (18/11). Ketua Umum PBNU melakukan safari ke sejumlah pondok pesantren besar di Jawa Timur menjelang Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-34 pada Desember 2021 mendatang.

IDN: ANT

IDN: ANT

**PENGUMUMAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 127 bagi pihak-pihak yang berkeberatan atau berkepentingan dengan transaksi tersebut dan/atau ingin memperoleh informasi lebih lanjut atas pengambilalihan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis kepada Perseroan, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini diantar kepada:

PT. ITRONINDO SEWA ENERGI  
Jl. Raya Pulo Gebang No. 43 E,  
Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung,  
Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan para kreditor Perseroan tidak menyampaikan keberataannya, maka para kreditor tersebut dianggap telah menyetujui rencana pengambilalihan saham perseroan oleh Sdr. Hafiani Eka Yudianto.

Jakarta, 19 November 2021  
Direksi  
PT. ITRONINDO SEWA ENERGI